BPMP
PROVINSI
SULAWESI UTARA
lpmpsulawesiutara.kemdikbud.go.id

RENSTRA
RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA

lpmpsulawesiutara.kemdikbud.go.id

REVIU
TAHUN 2022

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Sulawesi Utara

(0431) 825-492
BPMP Sulawesi Utara
@bpmpsulawesiutara

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 dapat disusun dengan baik.

Renstra BPMP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan lembaga yang memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan (IKK) pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Utara, yang akan dijadikan salah satu pedoman pengambilan keputusan dan pelaksanaan kinerja organisasi dan sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi atas kinerja BPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024.

Renstra BPMP Provinsi Sulawesi Utara ini telah ditinjau dan dilakukan perubahan untuk penyesuaian yang diperlukan dengan mempertimbangkan kebijakan internal, serta perkembangan kebutuhan para pemangku kepentingan atas layanan penjaminan mutu pendidikan yang diberikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Renstra BPMP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024 ini telah mengalokasikan sumber daya pendidikan dan diharapkan dapat mendukung pencapaian program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024.

Manado, Juli 2022

Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Utara,

Febry H. J. Dien, ST., M.Inf.Tech(MAN)

NIP 19710202042005011002

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....1
DAFTAR ISI.....2
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....3

BAB 1 PENDAHULUAN.....1
1.1. Kondisi Umum.....1
A. Capaian Kinerja LPMP Prov Sulawesi Utara Tahun 2015-2019.....2
B. Isu Strategis yang Berkembang.....9
1.2. Potensi dan Permasalahan.....12
A. Potensi yang Dimiliki.....13
B. Permasalahan yang Dihadapi.....15
C. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman.....17

BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN.....19

2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....24
2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....25

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KEBIJAKAN.....28

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....28
3.2. Kerangka Regulasi.....30
3.3. Kerangka Kelembagaan.....31
3.4. Reformasi Birokrasi Kelembagaan.....32

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....34

4.1. Target Kinerja.....34
4.2. Kerangka Pendanaan.....38

BAB 5 PENUTUP.....40

LAMPIRAN

Daftar Tabel dan Gambar

Grafik 1.1 : Capaian SNP Provinsi Sulawesi Utara 2

Grafik 1.2 : Tren Capaian Nilai SAKIP LPMP Provinsi Sulawesi Utara 9

Tabel 1.1 : Matriks Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 17

Tabel 2.1 : Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan 26

Tabel 3.1 : Peran LPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung agenda pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan.....29

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi LPMP Provinsi Sulawesi Utara.....31

Tabel 4.1 : Sasaran Kegiatan , Indikator Kinerja, dan Target Kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024 34

Tabel 4.2 : Indikator Kinerja pada 2 (dua) sasaran kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 di LPMP Provinsi Sulawesi Utara.....36

Tabel 4.3 : Kerangka Pendanaan Kegiatan LPMP Provinsi Sulawesi Utara 38

Tabel 4.4 : Kerangka Pendanaan Pencapaian Indikator Kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Utara.....39

Bab 1 Pendahuluan

1.1. KONDISI UMUM

A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPMP

Penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di wilayah Provinsi dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang penjaminan mutu pendidikan. BPMP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana amanat peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, BPMP menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
b. pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
c. pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;

e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
g. pelaksanaan urusan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPMP harus menyusun program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

B. Capaian Kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2019

1. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan.

Jumlah sekolah yang melakukan pengumpulan data mutu pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Sekolah di Provinsi Sulawesi Utara yang melakukan Pengumpulan Data/Pemetaan Mutu PMP Tahun 2016, 2017, 2018, 2019

Jenjang	2016	2017	2018	2019
SD	2215	2227	2217	1627
SMP	698	714	708	523
SMA	214	224	220	135
SMK	175	186	182	100
TOTAL	**3.302**	**3.351**	**3.327**	**2385**

Selama kurun waktu dari tahun 2016-2019, penjaminan mutu pendidikan dikdasmen di Provinsi Sulawesi Utara telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dari meningkatnya rata-rata capaian SNP pada masing-masing jenjang pendidikan sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

Grafik 1.1. Capaian SNP Provinsi Sulawesi Utara

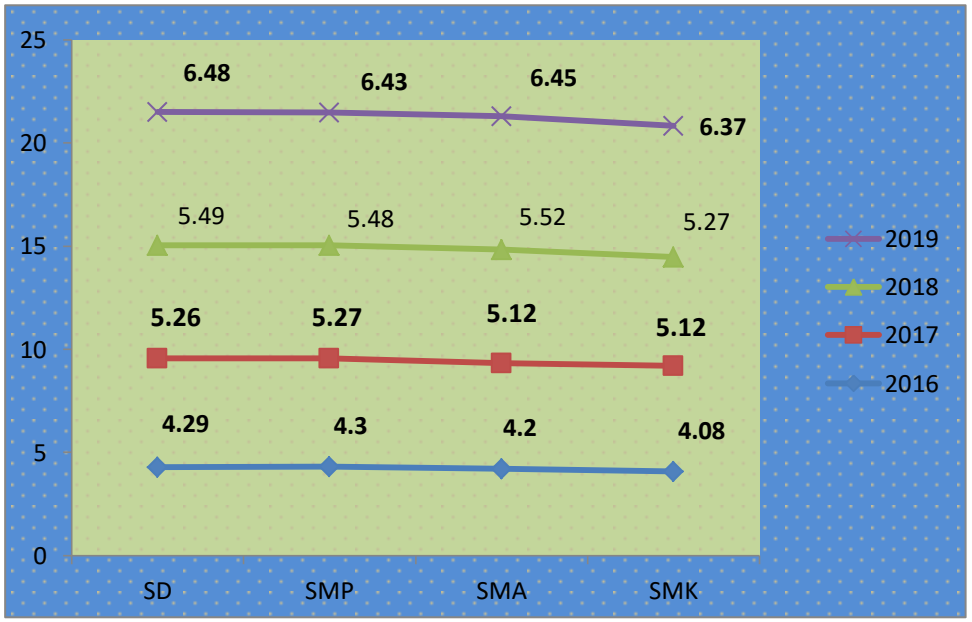

Pada grafik di atas dapat dilihat pergerakan rerata capaian SNP di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2016 hingga 2019 yang cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 untuk jenjang SD berada pada angka 4,29, jenjang SMP 4,30, jenjang SMA 4,20, dan jenjang SMK 4,08. Kemudian pada tahun 2017 jenjang SD meningkat signifikan menjadi 5,26, jenjang SMP meningkat menjadi 5,27, jenjang SMA menjadi 5,12, dan jenjang SMK 5,12. Selanjutnya pada tahun 2018 rerata capaian SNP jenjang SD meningkat menjadi 5,49, jenjang SMP sedikit mengalami penurunan menjadi 5,48, jenjang SMA meningkat menjadi 5,52, dan jenjang SMK turun menjadi 5,27. Data terakhir pada tahun 2019 jenjang SD meningkat menjadi 6,48, jenjang SMP meningkat menjadi 6,55, jenjang SMA meningkat menjadi 6,16, dan jenjang SMK meningkat dari tahun sebekumnya menjadi 6,37. Proses pemetaan tahun 2019, jumlah sekolah yang mengisi data melalui aplikasi PMP mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018, 2017, dan tahun 2016. Sekolah yang tidak melakukan pengisian data melalui aplikasi PMP mengalami penurunan dikarenakan perbaikan sistem yang dilakukan melalui pemberdayaan pengawas, operator kecamatan, dan operator sekolah dalam proses tersebut, sehingga kontrol LPMP atas proses pengisian data oleh satuan pendidikan semakin efektif di tahun 2019. Hal inilah yang meningkatkan capaian indikator kinerja terkait pemetaan mutu pendidikan tersebut. Sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dijabarkan pada 12 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berikut deskripsi ketercapaian dua belas indikator kinerja

LPMP pendukung sasaran strategis 1 (meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan) selama tahun 2019.

1) **IKK 1.1 Sekolah Dasar yang Terpetakan Mutunya**

   Indikator kinerja SD yang telah dipetakan mutunya mengalami kenaikan capaian dari tahun 2016, 2017, 2018 sampai tahun 2019. Pada tahun 2019 Capaian 100% target Renstra SD dipetakan mutu pendidikannya dapat tercapai.

2) **IKK 1.2. Persentase SD yang Meningkat Indeks Efektivitasnya**

   Berdasarkan data sekolah jenjang SD di Provinsi Sulawesi Utara, menggambarkan capaian peningkatan indeks efektivitas. Hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.2 (Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya) dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 dan target capaian Renstra LPMP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 -2019.

3) **IKK 1.3. SMP yang Telah Dipetakan Mutu Pendidikannya**

   Jumlah sekolah jenjang SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya mengalami peningkatan pada 2017 dan tahun 2019. hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.3 dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 dan target capaian Renstra 2016 – 2019 LPMP Provinsi Sulawesi Utara.

4) **IKK 1.4. Persentase SMP yang Meningkat Indeks Efektivitasnya**

   Berdasarkan data sekolah jenjang SMP di Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan rerata capaian SNP terjadi di tahun 2017, sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan. Kemudian tahun 2019 mengalami kenaikan dan hal ini menggambarkan capaian peningkatan indeks efektivitas tahun 2019. Hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.4 (Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya) dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 dan target capaian Renstra 2016 – 2019 LPMP Provinsi Sulawesi Utara.

5) **IKK 1.5. SMA yang Terpetakan Mutunya**

   Jumlah sekolah jenjang SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya mengalami penurunan tahun 2018 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2019. Kemudian hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.5 dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 dan target capaian Renstra 2016 – 2019 LPMP Provinsi Sulawesi Utara.

6) IKK 1.6. Persentase SMA yang Meningkat Indeks Efektivitasnya

Berdasarkan data sekolah jenjang SMA di Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan rerata capaian SNP pada tahun 2017 dan 2019. Hal ini menggambarkan capaian peningkatan indeks efektivitas. Hasil pengukuran kinerja untuk IKK 1.6 (Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya) dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 dan target capaian Renstra 2016 – 2019 LPMP Provinsi Sulawesi Utara.

7) IKK 1.7. SMK yang Terpetakan Mutunya

Pada tahun 2018, realisasi capaian pada persentase SMK yang telah dipetakan mutunya sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 100% (185 sekolah) berhasil terealisasi 89,19% (165 sekolah), dengan persentase capaian kinerja sebesar 89,19% Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, jumlah SMK yang telah dipetakan mutunya mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah SMK yang telah dipetakan 175 sekolah, meningkat menjadi 186 sekolah pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami penurunan dari target 185 sekolah, yang terealisasi sejumlah 165 sekolah. Dengan demikian Realisasi Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya sebagai berikut: tahun 2016 terealisasi 97,22% pada tahun 2017 menjadi 103,33% serta tahun 2018 terealisasi 89,19%. Kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2017 menunjukkan adanya kesadaran dari satuan pendidikan untuk melakukan evaluasi diri melalui pemetaan mutu dengan menggunakan aplikasi PMP. Meningkatnya persentase SMK yang telah dipetakan mutunya tersebut juga didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemetaan mutu melalui peranan pengawas sekolah jenjang SMK, yang berperan penting dalam melakukan bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan ke sekolah binaannya. Untuk tahun 2019 dari 185 SMK 100 SMK telah dipetakan mutunya dan secara rerata nilai jenjang SMK sebesar 6.37, secara rerata nilai capaian rapor mutu tahun 2019 meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi secara kuantitas jumlah sekolah menurun dibanding tahun 2016-2018.

8) **IKK 1.8. Persentase SMK yang Meningkat Indeks Efektivitasnya**

Berdasarkan data sekolah jenjang SMK di Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan rerata capaian SNP dibandingkan tahun 2018. Hal ini menggambarkan capaian peningkatan indeks efektivitas.

9) **IKK 1.9. Persentase SD yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP**

Tren capaian Persentase SD yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 40% (911 sekolah), meningkat pada tahun 2018 sebesar 41,31% (941 sekolah) dengan persentase capaian sebesar 103%. kemudian tahun 2019 jumlah SD yang telah disupervisi adalah sebanyak 2236 sekolah dan difasilitasi berjumlah 134 sekolah, dari target sebesar 134 sekolah berhasil realisasi sebesar 134 sekolah (100%).

10) **IKK 1.10. Persentase SMP yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP**

Tren capaian Persentase SMP yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2017, dari target 283 sekolah (40%) berhasil terealisasi sebesar 289 sekolah (40,84%) dengan persentase capaian sebesar 102%. Tahun 2019 SMP yang telah disupervisi sebanyak 723 sekolah dari target 714 sekolah (101% capaian kinerja) dan difasilitasi target tahun 2019 berjumlah 58 sekolah dan terealisasi 58 sekolah atau 100%.

11) **IKK 1.11. Persentase SMA yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP**

Capaian Kinerja tahun 2018 yang telah disupervisi dan difasilitasi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017. Untuk jenjang SMA, tahun 2018 dari target sebesar 40% (92 sekolah) berhasil terealisasi sebesar 40% (92 sekolah) dengan persentase capaian sebesar 100%. Tahun 2019 jumlah sekolah yang ditargetkan untuk disupervisi 222 sekolah terealisasi sebanyak 225 sekolah. Sekolah yang difasilitasi sebanyak 23 sekolah dan capaian kinerja sesuai dengan target atau capaian 100%.

12) **IKK 1.12. Persentase SMK yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP**

Persentase SMK yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP Tren capaian Persentase SMK yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Untuk tahun 2018 dari target 92 sekolah (40%) berhasil terealisasi sebesar 40% (92 sekolah) dengan persentase capaian sebesar 100%.

Tahun 2019 jumlah SMK yang telah disupervisi sebanyak 188 sekolah dari target 185 sekolah atau mecapai 102%. Kemudian yang difasilitasi berjumlah 25 sekolah dan semua sekolah tersebut berhasil terealisasi sehingga hasilnya mencapai persentase sebesar 100%.

Intervensi yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Sulawesi Utara untuk mendukung pencapaian IKK 1.1 – IKK 1.8 dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- **Satuan Pendidikan yang Telah Terpetakan Mutu Pendidikannya**

1. Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu
2. Analisis Data Mutu
3. Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu
4. Diseminasi Pemetaan Mutu
5. Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan.

Output: 3345 Sekolah. Laporan hasil review Analisis dan Penyusunan Peta Mutu Pendidikan Provinsi dan kabupaten/Kota yang telah disampaikan kepada *stakeholder* pendidikan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota se- Provinsi Sulawesi Utara.

Outcome : Tersedianya rekomendasi pemenuhan mutu satuan pendidikan untuk semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian SNP.

Intervensi yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Sulawesi Utara untuk mendukung pencapaian IKK 1.9 – IKK 1.12 dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Satuan Pendidikan yang Disupervisi dalam Pencapaian SNP

- **Penyusunan Bahan Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan**

a. Bimbingan Teknis Supervisi:

- Bimtek Fasilitator Daerah tingkat Provinsi
- Bimtek Supervisi Tingkat Kabupaten/Kota
- Pendampingan Petugas LPMP ke Lokasi Bimbingan Teknis Supervisi

b. Supervisi Satuan Pendidikan

c. Analisis Supervisi Mutu Pendidikan

d. Diseminasi dan Rekomendasi Hasil Supervisi.

Output **:** Satuan pendidikan yang telah disupervisi sejumlah 240 sekolah.

Outcome **:** meningkatnya rerata capaian SNP dari tahun 2016 – 2019 (SD meningkat 0.99, SMP meningkat 0.95, SMA meningkat 0.94, dan SMK meningkat 1.1).

b. Satuan Pendidikan yang Telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP

1. Sekolah yang difasilitasi melalui LPMP Provinsi Sulawesi Utara :

- Sosialisasi SPMI ;
- Bimbingan Teknis SPMI ;
  - Bimtek Fasilitator DaerahTingkat Provinsi
  - Pendampingan Petugas LPMP di Kabupaten/Kota
  - Bimtek SPMI di Kabupaten/Kota
- Pendampingan Sekolah yang difasilitasi Melalui LPMP Provinsi Sulawesi Utara:
  - Verifikasi Sekolah Model
  - Pendampingan Sekolah Model
  - Sosialisasi dan penandatanganan MOU bantuan pemerintah sekolah model
  - Monev SPMI
  - Verifikasi sekolah rujukan
- Pendampingan Sekolah yang difasilitasi oleh Direktorat :
  - Pendampingan Sekolah rujukan

- Koordinasi Pelaksanaan Lomba, festival dan olimpiade jenjang SMP;
- Pelaksanaan Gala Siswa Indonesia SMP;
- Training OSN Jenjang SMP;
- Koordinasi Pelaksanaan Lomba, festival dan olimpiade tingkat Provinsi;
- Koordinasi Pelaksanaan FLS2N Jenjang SD;
- Koodinasi pelaksanaan O2SN Jenjang SD;
- Bimtek Peningkatan Mutu Sekolah Dasar
- Bantuan Pemerintah untuk sekolah dasar;

- Monitoring dan Evaluasi;

2. Sekolah yang difasilitasi melalui Kemitraan

- Bimtek SPME ;
- Diseminasi Hasil ;

*Output***:** Satuan pendidikan yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP berjumlah 240 sekolah.

*Outcome***:** Meningkatnya kriteria capaian SNP dari tahun 2016 – 2019 (SD,SMP,SMA,SMK meningkat dari menuju SNP 3 ke menuju SNP 4).

b. Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya

- Bimbingan Teknis Pengawas;
- Bimbingan Teknis Fasilitator Pengumpulan Data ;
- Pelaksanaan Pengumpulan Data;
- Verifikasi dan Validasi ;

Output: 3345 Sekolah. Terkumpulnya data mutu pendidikan melalui aplikasi PMP untuk semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK).

Outcome: Adanya rapor mutu capaian SNP satuan pendidikan semua jenjang sebagai dasar untuk menyusun RKS/RKAS

- **Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Tatakelola LPMP Provinsi Sulawesi Utara yang Baik**

Tatakelola LPMP Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan perbaikan. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan:

1. Ditetapkannya LPMP Provinsi Sulawesi Utara menjadi Calon Satker ZI/WBK oleh Kemenpan pada tahun 2019.

IKK 2.13 Nilai Minimal SAKIP

Upaya yang telah dilakukan LPMP Provinsi Sulawesi Utara untuk pemenuhan target capaian IKK 2.13 :

1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP secara berkelanjutan.
2. Pemantauan capaian kinerja secara berkala melalui rapat bulanan tim

Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir diperoleh capaian nilai SAKIP sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

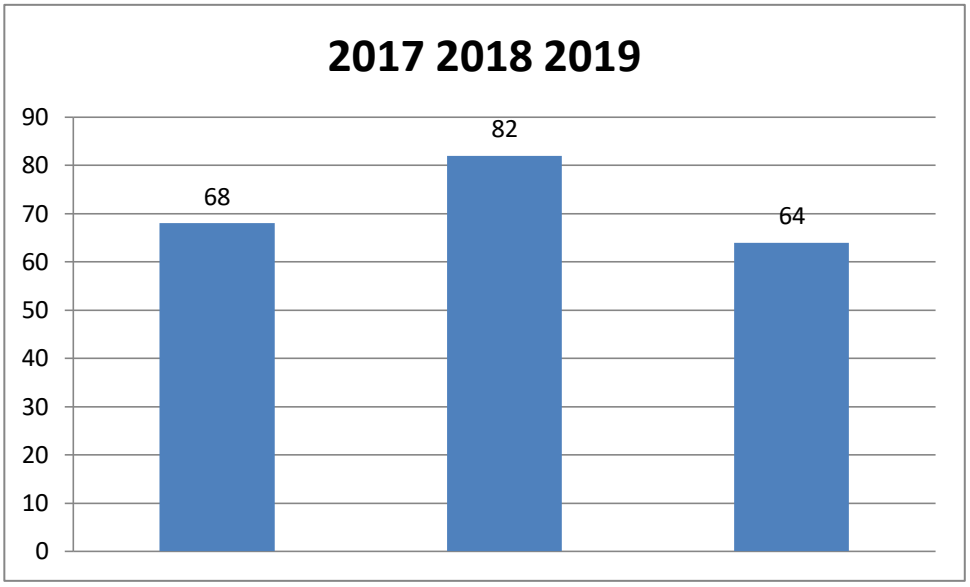

C. Isu Strategis yang Berkembang

a. **Paradigma Pembelajaran Abad 21**

Pembelajaran abad 21 merupakan suatu pembelajaran yang bercirikan *learning skill* dimana kegiatan pembelajaran ditandai dengan adanya kerjasama, komunikasi, berpikir

kritis dan kreatif. Pergeseran pola pikir dan pola tindak dalam pelaksanaan pembelajaran ini perlu dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan sebagai upaya meningkatkan kualitas mutu lulusan dalam menghadapi tantangan di abad 21. Pergeseran ini ditandai dengan adanya perubahan pada proses pembelajaran yang meliputi: berpusat pada siswa, pembelajaran yang interaktif, membangun jejaring, aktif menyelidiki, kontekstual, pembelajaran berbasis tim, memberdayakan kaidah keterikatan, stimulasi segala penjuru (memaksimalkan seluruh panca indera dalam proses pembelajaran), menggunakan berbagai multimedia, kooperatif, multi disiplin, otonomi dan kepercayaan (merdeka belajar), berpikir kritis dan kreatif, transfer pengetahuan. Perubahan proses pembelajaran ini diharapkan akan menghasilkan SDM abad 21 yang memiliki kompetensi yaitu:

a. Berpikir kritis dan pemecahan masalah
b. Berkomunikasi dan bekerjsama
c. Mencipta dan membaharui
d. Literasi teknologi informasi dan komunikasi
e. Belajar kontekstual (mandiri)
f. Informasi dan literasi media

(BSNP, Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI, 2010)

b. Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan sebuah gerakan dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui berbagai program satuan pendidikan dengan memfokuskan keharmonisan hati, rasa, pikir, dan raga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (Perpres 87 tahun 2017, Penguatan Pendidikan Karakter).

Penanaman dan pengembangan karakter di sekolah sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perilaku negatif siswa di sekolah dan di luar sekolah sangat memprihatinkan. Tawuran antar siswa, kurangnya kesantunan, kejujuran, disiplin adalah beberapa contoh yang tengah melanda para siswa. Pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan lebih banyak melalui proses pembelajaran dan kurang menekankan pada

proses pembelajaran dan kurang memprioritaskan proses, pembiasaan, keteladanan dan penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembinaan ahlak mulia yang didukung dengan keterlibatan orang tua dan masyarakat secara proporsional. Perlu dilakukan upaya secara intensif, ekstensif, *holistic* dan terprogram. Keterlibatan berbagai pihak seperti sekolah, keluarga dan masyarakat akan sangat membantu dalam pembentukan karakter peserta didik.

c. Pengintegrasian Literasi dalam Pembelajaran

Dalam pendidikan modern dan tantangan era global sekarang ini, keberliterasian bukan lagi sekadar urusan bagaimana suatu bangsa bebas dari buta aksara, tetapi telah menjadi syarat kecakapan hidup dan kemampuan bersaing satu negara dalam persaingan pasar kerja.

Makna pembiasaan membaca di sekolah juga menjadi bagian penting dalam kerangka penumbuhan budi pekerti melalui penumbuhan kecakapan berbahasa. Penumbuhan budaya literasi harus dimulai melalui upaya pembiasaan gemar membaca menulis sebagai langkah pertama dalam satu masa pembentukan budaya literasi.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan Gerakan Literasi Sekolah dengan tema "Bahasa Penumbuh Budi Pekerti". Sejalan dengan itu, Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan Gerakan Nasional Literasi Bangsa (GNLB) dengan tema "menciptakan ekosistem sekolah dan masyarakat berbudaya baca-tulis serta cinta sastra" dan dengan motto "mari menjadi bangsa pembaca". Gerakan ini dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa literasi tidak hanya dilakukan di sekolah tetapi juga di rumah dan lingkungan sekitar peserta didik.

Dengan demikian, sekolah dan masyarakat perlu mengembangkan praktik dan keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun bentuk-bentuk teks inovatif, simbol, dan multimedia (Abidin, 2015). Beragam teks yang digunakan dalam satu konteks ini disebut teks multimodal sehingga pembelajarannya bersifat multiliterasi yaitu menggunakan strategi literasi dalam pembelajaran dengan memadukan keterampilan abad ke-21 (keterampilan berpikir tingkat tinggi) dalam mengantar peserta didik memiliki kecakapan hidup sepanjang hayat. Untuk itu pendidikan perlu meningkatkan 6 literasi dasar:

1) Literasi Baca Tulis;
2) Numerasi;

3) Literasi Sains;
4) Literasi Finansial;
5) Literasi Digital;
6) Literasi Budaya dan Kewargaan.

d. **Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah suatu kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran untuk mencapai kecakapan berpikir dan belajar siswa. Kegiatan-kegiatan yang harus disiapkan oleh guru adalah kegiatan yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menggunakan teknologi komputer untuk melatih keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah melalui kolaborasi dan komunikasi dengan teman sejawat, guru-guru, ahli atau orang lain yang memiliki minat yang sama.

Dunia pendidikan dewasa ini hidup dalam dunia media, di mana kegiatan pembelajaran telah bergerak menuju dikuranginya sistem penyampaian bahan pembelajaran secara konvensional yang lebih mengedepankan metode ceramah, dan diganti dengan sistem penyampaian bahan pembelajaran modern yang lebih mengedepankan peran pembelajar dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pembelajaran sedianya berdampak pada kualitas lulusan melalui peningkatan kompetensi sesuai standar yang telah ditetapkan.

e. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Adanya pandemi virus covid 19 saat ini berdampak pada kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang semula tatap muka di kelas bergeser menjadi pendidikan jarak jauh.

Pendidikan jarak jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi serta media lainnya.

Metode pelaksanaan Pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) Pembelajaran jarak jauh Dalam Jaringan/online (Daring), menggunakan gawai (gadget) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring dan (2) Pembelajaran jarak jauh Luar Jaringan/offline (Luring), menggunakan televisi, radio,

modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar.

Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19 adalah Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.

Menyikapi isu strategis yang berkembang, maka Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan penjaminan mutu bersama-sama para pemangku kepentingan yang ada di daerah.

Penjaminan mutu yang dilakukan sebagai upaya untuk mendukung penyiapan generasi bangsa yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan di abad 21, memiliki karakter yang baik, kemampuan berliterasi dalam berbagai aspek serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana dalam pembelajaran apalagi dimasa pandemi covid-19.

Kemitraan antara BPMP dengan Dinas Pendidikan yang ada di daerah secara berkelanjutan dalam mengakselerasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan terutama pada standar kompetensi lulusan selalu menjadi prioritas dimana sekolah diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai bekal bagi peserta didik menghadapi tantangan abad 21.

Pendampingan terhadap sekolah dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan secara internal dengan didukung oleh dinas pendidikan sebagai unsur eksternal bersama pemangku kepentingan lainnya adalah upaya percepatan pememenuhan delapan standar nasional pendidikan. Peningkatan kompetensi guru menjadi tantangan saat ini karena guru memegang peran yang sangat penting dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru seperti diklat, bimtek, pendampingan, serta kegiatan lainnya sehingga guru memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengelola proses pembelajaran yang dapat membawa peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi sebagai implementasi pembelajaran abad 21.

Selain permasalahan kompetensi guru, manajemen sekolah juga menjadi tantangan tersendiri bersama dengan kemampuan pengawas sekolah dalam membimbing dan mendampingi sekolah binaannya. Namun demikian dengan kerjasama yang baik dan keyakinan yang kuat bahwa pemenuhan standar nasional pendidikan dapat tercapai di Provinsi Sulawesi Utara.

Oleh karena itu kegiatan pemetaan mutu, supervisi, pendampingan sistem penjaminan mutu internal di sekolah menjadi bagian tak terpisahkan dari penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Sulawesi Utara serta meningkatkan peran tim penjaminan mutu pendidikan di daerah sebagai unsur eksternal.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Provinsi Sulawesi Utara, terletak antara 0° - 05° lintang utara dan 121° - 127° bujur timur, merupakan wilayah yang berbatasan di sebelah utara dengan Negara Filipina, di sebelah timur dengan Provinsi Maluku, di sebelah selatan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, dan di sebelah barat dengan Selat Makassar.

Wilayah Provinsi Sulawesi Utara mencakup areal seluas 27.488 kilometer persegi. Pada tahun 1990 tata guna lahan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara meliputi areal hutan seluas 16.080 kilometer persegi atau 58,5 persen, areal semak belukar seluas 2.749 kilometer persegi atau 10 persen, areal padang rumput seluas 330 kilometer persegi atau 1,2 persen, areal ladang seluas 357 kilometer persegi atau 1,3 persen, areal dataran tinggi seluas 1.100 kilometer persegi atau 4,0 persen, areal sawah seluas 1.127 kilometer persegi atau 4,1 persen, areal perkebunan seluas 3.161 kilometer persegi atau 11,5 persen, areal perairan darat seluas 82 kilometer persegi atau 0,3 persen, areal tandus seluas 55 kilometer persegi atau 0,2 persen, areal permukiman seluas 550 kilometer persegi atau 2,0 persen, dan areal budidaya lainnya seluas 1.897 kilometer persegi atau 6,9 persen dari seluruh luas wilayah.

Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, 3 Kabupaten/Kota merupakan daerah Kepulauan. 15 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, dan Kota Kotamobagu.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan wilayah dataran tinggi dan pegunungan, dan berada pada ketinggian antara 100-1.000 meter di atas permukaan laut, serta terdiri atas wilayah daratan utama dan wilayah kepulauan yang tersebar di bagian utara. Wilayah ini memiliki danau, sungai, dan waduk dengan luas perairan umum keseluruhannya kurang lebih 40.000 hektare. Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis basah yang dipengaruhi angin muson sehingga curah hujan cukup merata setiap tahunnya beragam antara 2.500-3.000 milimeter. Suhu udara beragam antara 21° Celsius - 31° Celcius. Gunung api juga terdapat di daratan Sulawesi Utara dan ada beberapa yang masih aktif, yang secara geologis membentuk tanah

permukaan yang cukup tebal dengan tingkat kesuburan yang tinggi. Sebagai wilayah semenanjung dan kepulauan, beberapa kawasan di wilayah Sulawesi Utara tergolong pada kawasan yang rawan bencana alam, antara lain gempa bumi, letusan gunung berapi, gerakan tanah, erosi tanah, banjir, dan kekeringan.

Lahan di Provinsi Sulawesi Utara sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian terutama tanaman perkebunan. Selain itu, wilayah ini juga memiliki sumber daya tambang dan kelautan (maritim) yang memiliki potensi untuk dikembangkan, yang dewasa ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Sulawesi Utara memiliki potensi, yang seyogyanya dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan pendidikan.

Rencana Strategis BPMP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 tidak terlepas pada perjalanan pelaksanaan rencana strategis LPMP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015-2019. Hasil pelaksanaan dan analisis pelaksanaan digunakan sebagai acuan dalam merumuskan arah dan kebijakan dari kementerian sehingga menghasilkan kebijakan antara pusat dan daerah.

A. Potensi yang dimiliki

Mengacu kepada Rencana Strategis Kemendikbud tahun 2020-2024, beberapa potensi yang bisa menjadi perhatian, adalah :

a. Sumber Daya Manusia yang memadai

BPMP Provinsi Sulawesi Utara merupakan lembaga yang memiliki tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Proses penjaminan, peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan akan berhasil bila ditunjang dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang profesional dan memadai. BPMP Provinsi Sulawesi Utara memiliki ketersediaan sumberdaya manusia sejumlah 7 orang PNS. Dari 79 orang PNS memiliki kualifikasi pendidikan S-3 sejumlah 3 orang, S-2 sejumlah 20 orang, S-1 sejumlah 29 orang, D3 sejumlah 1 orang, SMA/sederajat sejumlah 23 orang, SMP/sederajat sejumlah 2 orang dan SD/sederajat sejumlah 1 orang.

Tabel Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
S3	3
S2	20
S1/DIV	29
DIII	1
DII	0
DI	0
SMA	23
SMP	2
SD	1
Jumlah	79

Dari 79 orang PNS yang sudah golongan IV/b sejumlah 2 orang, golongan IV/a sejumlah 13 orang, golongan III/d sejumlah 17 orang, golongan III/c sejumlah 11 orang, golongan III/b sejumlah 14 orang, golongan III/a sejumlah 19 orang, golongan II/b sejumlah 1 orang, golongan II/a sejumlah 1 orang, dan golongan I/d sejumlah 1 orang

Tabel Golongan

Golongan	Pangkat	Jumlah pegawai
I a	Juru Muda	0
I b	Juru Muda Tk. I	0
I c	Juru	0
I d	Juru Tk. I	1
II a	Pengatur Muda	1
II b	Pengatur Muda Tk. I	1
II c	Pengatur	0
II d	Pengatur Tk. I	0
III a	Penata Muda	19
III b	Penata Muda Tk. I	14
III c	Penata	11
III d	Penata Tk. I	17
IV a	Pembina	13
IV b	Pembina Tk. I	2
IV c	Pembina Utama Muda	0
IV d	Pembina Utama Muda Tk. I	0
IV e	Pembina Utama	0
JUMLAH		79

Kompetensi yang beragam telah dimiliki oleh seluruh sumberdaya BPMP Provinsi Sulawesi Utara untuk sementara)* sesuai dengan peta jabatan dalam Permendikbud Nomor 12 Tahun 2019 yang ada untuk menunjang pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara.

b. Sarana dan Prasarana yang menunjang

Perbaikan dan Pengembangan Sarana dan prasarana BPMP Provinsi Sulawesi Utara terus dilakukan dengan program revitalisasi baik Gedung kantor, ruang kelas dan asrama termasuk ruangan penunjang lainnya. Selain itu, terus dilakukan pengembangan jaringan internet sebagai salah satu bentuk teknologi informasi dan telah dimanfaatkan sejak tahun 2010 hingga sekarang. Hal ini semakin memperkuat BPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Portal BPMP Provinsi Sulawesi Utara serta Website yang berisi informasi yang terus ter-update, tersaji dalam sistem teknologi informasi Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Sulawesi Utara dengan berbagai layanan informasi dan konsultasi serta layanan pengaduan. Layanan informasi dan konsultasi yang dapat dilaksanakan antara lain NUPTK, Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penilaian Angka Kredit, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Pemetaan Mutu Pendidikan, Program Bimtek, Publikasi ilmiah, dan Inovasi lainnya.

c. Capaian Program tahun 2016 – 2019

Sasaran strategis LPMP Provinsi Sulawesi Utara berupa meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan ini secara umum tercapai selaras dengan target Renstra LPMP Provinsi Sulawesi Utara 2015-2019. Capaian sasaran strategis ini dilihat dari rerata kenaikan skor SNP secara agregat di tingkat Provinsi yang berdampak pada kenaikan level di semua jenjang jika dihitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2019.

Deskripsi capaian sasaran strategis per jenjang adalah sebagai berikut :

a) Capaian sasaran strategi suntuk jenjang SD di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2019 mengalami peningkatan yang terlihat dari naiknya kategori SNP jenjang SD. Kategori SNP SD pada level menuju SNP 3 dengan skor 4,29 meningkat ke level menuju SNP 4 dengan skor 6,48.

b) Capaian sasaran strategis untuk jenjang SMP di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Peningkatan tersebut terlihat dari naiknya kategori SNP jenjang SMP. Jika tahun 2016 Kategori SNP SMP pada level menuju SNP 3 dengan skor 4,3 meningkat ke level menuju SNP 4 dengan skor 6,43.

c) Capaian sasaran strategi untuk jenjang SMA di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Peningkatan tersebut terlihat dari naiknya kategori SNP jenjang SMA. Jika tahun 2016 Kategori SNP SMA pada level menuju SNP 3 dengan skor 4,2 meningkat ke level menuju SNP 4 dengan skor 6,45.

d. Kepercayaan Para Pemangku Kepentingan

Kontribusi BPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan tugas dan fungsi telah memberikan respek dan dampak bagi para pemangku kepentingan di daerah. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang selama ini dilakukan BPMP Provinsi Sulawesi Utara di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara telah banyak membantu pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan bersama pemangku kepentingannya.

Melalui program – program penjaminan mutu, diantaranya Pendampingan dan advokasi Program Sekolah Penggerak, Sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan Asesmen Nasional, Advokasi dan Sosialisasi Pedoman pembelajaran paradigma baru, Advokasi dan Sosialisasi Pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi, Penyusunan dan pelaksanaan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan, Pendampingan DAK, pemutakhiran data satuan pendidikan, serta pemetaan mutu pendidikan. Program dan kegiatan tersebut, telah memberikan manfaat yang besar bagi usaha peningkatan mutu Pendidikan di masing – masing daerah. Hal ini tentunya diapresiasi oleh seluruh pemangku kepentingan di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Kepercayaan pemangku kepentingan kepada BPMP Provinsi Sulawesi Utara, selain karena keberhasilan program dan kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang secara massif dilakukan setiap tahun, kepercayaan pemangku kepentingan bertambah karena ditunjang juga oleh dukungan sarana dan prasarana yang tersedia di BPMP Provinsi Sulawesi Utara yang sudah sangat representatif dan memadai digunakan sebagai bagian dari ekosistem untuk menunjang peningkatan mutu Pendidikan.

Kepercayaan para pemangku kepentingan kepada BPMP Provinsi Sulawesi Utara, dapat juga dilihat dari hasil pengisian instrumen yang memberi respon positif dan rasa puas terhadap apa yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Sulawesi Utara.

B. Permasalahan yang dihadapi

Renstra BPMP Provinsi Sulawesi Utara disusun salah satunya diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan terkait penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam memberikan arahan, saran, bimbingan dan bantuan teknis dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang disebabkan beberapa permasalahan pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara di antaranya :

a. Kekurangan guru

Berdasarkan Permendikbud No.23 Tahun 2013 menyatakan bahwa Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan, Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran. Dan untuk SMA dan SMK sesuai Permendiknas No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru. Sesuai dengan verifikasi PDSP Kemdibud dan Dirjen GTK tahun 2019 di Sulawesi Utara terdapat kekurangan guru 1.444 untuk SD negeri, 1686 untuk SD swasta, 2.958 untuk SMP negeri, 1954 untuk SMP swasta, 584 untuk SMA Negeri, 1031 untuk SMA Swasta, 1182 untuk SMK Negeri dan 1687 untuk SMK Swasta. Potensi permasalahan yang timbul adalah rendahnya capaian standar kelulusan.

b. Kualifikasi pendidikan guru yang belum seluruhnya memenuhi standar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 menyebutkan kualifikasi minimal guru adalah D4/S1. Sesuai dengan verifikasi PDSP Kemdikbud tahun 2019 di Sulawesi Utara asih terdapat 20,6% guru SD, 11,7% guru SMP, 1,9% guru SMA dan 4,5% guru SMK yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah D4/S1. Potensi permasalahan yang timbul adalah rendahnya capaian standar pendidik dan tenaga kependidikan ditinjau dari aspek kualifikasi pendidikan.

c. Belum semua guru bersertifikat pendidik

Berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2017 pasal 2 Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Guru dalam Jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan

pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Data Ditjen GTK, November 2019 guru yang berlum bersertifikat di Provinsi Sulawesi Utara adalah : Guru SD 46,5%, Guru SMP 40,7%, Guru SMA:44,5%, Guru SMK:57,5%

Potensi permasalahan yang timbul adalah rendahnya capaian standar kelulusan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Peran serta pemerintah daerah yang belum optimal

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagai kewajiban yang melekat pada satuan pendidikan sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 seyogyanya mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Tindak lanjut hasil penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan internal belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dalam menyusun program dan kebijakan perbaikan dan peningkatan mutu yang dapat mendorong satuan pendidikan memenuhi maupun melampaui standard nasional pendidikan.

C. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman

Adanya analisis yang cermat dan tepat terhadap lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Utara terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Utara akan memberikan gambaran potensi dan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memaksimalkan kekuatan dan meminimalisir kelemahan serta memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Hasil identifikasi Analisis internal dan eksternal akan membantu memaksimalkan peran BPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas penjaminan mutu di daerah. Berikut ini digambarkan hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman :

Tabel 1.1. Matriks Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi cukup memadai serta beragamnya jabatan yang mengerjakan tupoksi dari jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu (widyaprada)	Belum tersedianya beberapa jabatan fungsional tertentu yang dapat mendukung tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sulawesi Utara yaitu pranata komputer, pustakawan, Perawat pelaksana, Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir, Arsiparis Penyelia.	Ketersediaan semua jabatan akan memaksimalkan tugas lembaga. Pentingnya peningkatan kompetensi semua jabatan baik umum maupun tertentu.	Sumber daya manusia yang sudah tidak mau lagi mengembangkan diri karena usia pensiun
Tersedianya sarana prasarana seperti lahan, gedung perkantoran, aula, asrama, lapangan, ruang fasilitas belajar dan fasilitas kerja yang memadai.	Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan perawatan untuk seluruh sarana dan prasarana yang menjadi aset BPMP Provinsi Sulawesi Utara	Pemanfaatan sarana dan prasarana oleh pihak ketiga untuk menggali sumber pendanaan bagi pemeliharaan dan perawatans arana dan prasarana BPMP Provinsi Sulawesi Utara	Tidak terpenuhinya target waktu pelaksanaan kegiatan internal BPMP dan kecukupan sarana prasarana.

Bab 2 Tujuan dan Sasaran

2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di daerah, BPMP Provinsi Sulawesi Utara mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan. BPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam mengemban amanat tersebut mendukung visi dan misi kementerian yang disusun berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta visi Indonesia 2045. Adapun visi Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2020-2024 adalah:

> "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global"

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan visi dan misi presiden tersebut.

Untuk mendukung pencapaian visi presiden, Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan misi presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Untuk itu, misi Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi maka BPMP Provinsi Sulawesi Utara mengemban amanat mendukung misi Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang pertama dan ketiga dari ketiga misi kementerian di atas. Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menjalankan tugas membangun pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra BPMP Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
b. Jujur dalam segala tindakan;
c. Menghindari benturan kepentingan;
d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;

g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan
i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru:
b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan:
c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan
h. Tidak monoton;

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

a. Responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;
b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;
c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan; dan
e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan,

berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.

4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
d. Memanfaatkan waktu dengan baik;
e. Suka mempelajari hal yang baru; dan
f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi.

5. Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. pegawai Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

a. Berkompetisi secara profesional;
b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
d. Tidak sewenang-wenang;
e. Tidak mementingkan diri sendiri;
f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan
g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

6. Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:

a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian;
b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja;
c. Peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis); dan
d. Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.

7. Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;
c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun);
d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa; dan
e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.

Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas diantara pegawai Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja Kemendikbud yang prima.

Perumusan tujuan Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ditujukan untuk menggambarkan ukuran- ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan sebagaimana berikut:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Perumusan tujuan dari Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diatas menjadi dasar perumusan tujuan dari unit eselon satu Direktorat Jenderal Paud, Dikdas dan Dikmen yaitu:

1. Perluasan akses pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan menengah bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas dan merata
3. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah yang berpusat pada daya saing dan berkarakter
4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Mengacu pada Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPMP Provinsi Sulawesi Utara **maka BPMP Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Tujuan Strategis sebagai berikut :**

1. Meningkatnya Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Masyarakat;
2. Terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Sulawesi Utara yang berkualitas.

Untuk mengukur tercapainya tujuan strategis, BPMP Provinsi Sulawesi Utara merumuskan indikator kinerja tujuan serta target keberhasilan yang akan dicapai pada akhir periode renstra. Indikator Kinerja Tujuan dan Target Keberhasilan yang akan dicapai pada akhir periode Renstra BPMP Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya. Target Kinerja 3,92%.
2. Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdasdan Dikmen). Target Kinerja 35%.
3. Predikat Sakip LPMP Provinsi Sulawesi Utara. Target kinerja A.

Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Strategis	Target Tahun 2024
TS1	Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3,92%
TS1	Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdasdan Dikmen)	35%
TS2	Terwujudnya tata kelola BPMP Provinsi Sulawesi Utara yang berkualitas	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sulawesi Utara	A

2.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024 oleh Kemdikbud yaitu:

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu

dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.

3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dari lima sasasaran strategis tersebut diatas ada 4 sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Paud, Dikdas dan Dikmen yaitu:

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
3. Menguatnya karakter peserta didik
4. Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

BPMP Provinsi Sulawesi Utara yang berdasarkan Tupoksinya memiliki sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang merupakan turunan dari sasaran program dan indikator kinerja program dari Ditjen Paud, Dikdas dan Dikmen. Berikut kami sampaikan sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja program/kegiatan:

Tabel 2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen*			**BPMP Provinsi Sulawesi Utara**	
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1.1	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	IKP 5.3.6. Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara.	IKK 5.3.6.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara. Target kinerja A

				IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara. Target kinerja 85
3.2	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	IKP 2.2.7. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	IKK 2.2.7.11. Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya Terget kinerja 3,92% IKK 2.2.7.12. Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdasdan Dikmen) Target Kinerja 35%

Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Visi periode kedua Presiden Joko Widodo untuk tahun 2020-2024 adalah
"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong"

Untuk mendukung ketercapaian visi tersebut maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait dengan tugas dan fungsi akan menjalankan salah satu misi nawacita kedua yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia dengan dua agenda:

(1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,

(2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

3.1.1. Arah Kebijakan

BPMP Provinsi Sulawesi Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sesuai tugas dan fungsinya mendukung ketercapaian sasaran strategis meningkatnya mutu satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Utara. Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan BPMP Provinsi Sulawesi Utara periode 2020-2024 dalam mencapai sasaran strategis tersebut mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah:

Tabel 3.1. : Peran BPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung agenda pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan

Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pemerataan Layanan pendidikan berkualitas	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Utara
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju,modern, dan berkarakter	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk Penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif

Tabel 3.1 menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi BPMP Provinsi Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara BPMP Provinsi Sulawesi Utara sebagai unit pelaksana teknis dengan instansi lain terkait beserta dengan pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. Prinsip mendasar yang menjadi pedoman arah kebijakan BPMP Provinsi Sulawesi Utara adalah mendukung arah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

3.1.2. Strategi BPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Sesuai tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sulawesi Utara maka strategi yang dilakukan dalam rangka penguatan penjaminan mutu Pendidikan adalah:

1. Menitik beratkan upaya penjaminan dan peningkatan mutu berdasarkan standar nasional Pendidikan.
2. Melaksanakan Fasilitasi, Advokasi dan pendampingan kepada para pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Utara untuk mengidentifikasi langkah-langkah

peningkatan mutu pembelajaran dari hasil praktik-praktik baik sesuai dengan kebutuhan.

3. Memperkuat peran BPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam kemitraan dan Kerjasama berdasarkan profil pendidikan.

3.2 KERANGKA REGULASI

BPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berpijak pada kerangka regulasi yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Peratuan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional tahun 2020 – 2024.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Permendikbud 13 tahun 2022 tentang Renstra kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 – 2024
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

3.3.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPMP Provinsi Sulawesi Utara sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai

Penjaminan Mutu Pendidikan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1. Sruktur Organisasi BPMP Sulawesi Utara

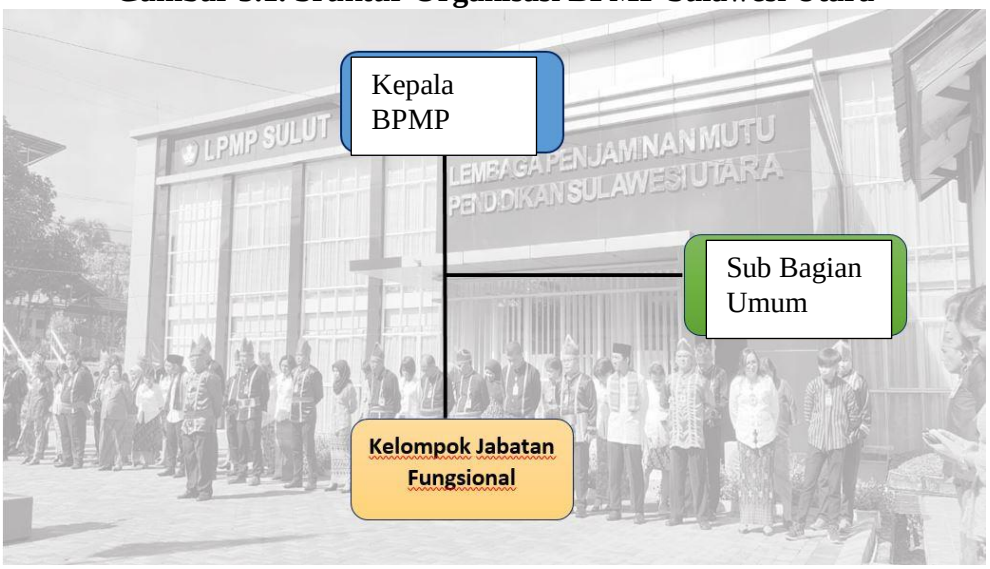

3.3.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan BPMP Provinsi Sulawesi Utara. Berbagai upaya yang dilakukan dalam pengelolaan ASN diprioritaskan bagi pengembangan dan peningkatan kompetensi ASN agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan agar dapat memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas bagi seluruh pengguna dan penerima layanan BPMP Provinsi Sulawesi Utara.

Fokus pengembangan kompetensi ASN BPMP Provinsi Sulawesi Utara pada periode Renstra 2020-2024 bertujuan untuk mewujudkan ASN berintegritas yang memiliki kompetensi, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship sesuai dengan roadmap SDM secara nasional.

3.4 REFORMASI BIROKRASI KELEMBAGAAN

Reformasi birokrasi internal BPMP Provinsi Sulawesi Utara merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur,ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan

BPMP Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dititikberatkan pada berbagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Utara.

BPMP Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2019 mencanangkan dan menandatangani deklarasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Dan pada tahun 2020 dan tahun 2022 diusulkan sebagai satuan kerja dengan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Hal ini menunjukkan komitmen pimpinan dan jajaran BPMP Provinsi Sulawesi Utara untuk mewujudkan ZI-WBK melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. BPMP Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2020-2024 memiliki komitmen untuk terus melanjutkan berbagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi enam area perubahan agar layanan berkualitas dan berintegritas dapat tumbuh dan berkembang menjadi budaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh warga BPMP Provinsi Sulawesi Utara.

Bab 4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden RI yang diamanahkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonolgi serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, BPMP Provinsi Sulawesi Utara menetapkan dua sasaran kegiatan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Tabel 4.1 : Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan BPMP Provinsi Sulawesi Utara

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	
Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	1.1.	Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya
		1.2.	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)
Meningkatnya akuntabilitas layanan danpengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara	2.1.	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara
		2.2.	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara

Tabel 4.2 Target Kinerja BPMP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	1.1. Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	-	-	0,98%	1,96%	3,92%
		1.2. Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	-	-	25%	30%	35%
2	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara	2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara	BB	BB	A	A	A
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara	81	82	83	84	85

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan BPMP Provinsi Sulawesi Utara dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 : Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BPMP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2022

Label	Kode	Program/Output	Pagu 2021	Pagu 2022
Program	03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	4.176.644.000	5.510.042.000
Kegiatan	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	4.176.644.000	5.510.042.000
Program	03.WA	Program Dukungan Manajemen	18.329.830.000	18.903.112.000
Kegiatan	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	18.329.830.000	18.903.112.000
		TOTAL	**22.506.474.000**	**24.413.154.000**

Tabel 4.4 : Kerangka Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPMP Provinsi Sulawesi Utara

Nomenklatur	Kode	Program / Kegiatan	Alokasi 2023 (Ribuan)	Alokasi 2024 (Ribuan)
Program	03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	13.215.651	13.215.651
Kegiatan	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	13.215.651	13.215.651
Program	03.WA	Program Dukungan Manajemen	20.825.822	20.825.822
Kegiatan	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	20.825.822	20.825.822

Bab 5 Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan proses tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi khususnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.

Kegiatan penjaminan mutu pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam pencapaian visi dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti: Pendampingan fasilitasi berdasarkan SNP; Fasilitasi, advokasi dan pemdampingan ke pemangku kepentingan di daerah, pemetaan mutu pendidikan; Pelaksanaan kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan serta supervisi dalam pencapaian standar nasional pendidikan.

Secara operasional, seluruh kegiatan BPMP Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara terarah dan terencana dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja termasuk pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran secara efisien dan efektif. Hal ini dilakukan dalam meningkatkan tata kelola dan efektivitas birokrasi serta pelibatan publik yang transparan, akuntabel dalam mendukung upaya penjaminan mutu dan pencapaian standar nasional pendidikan.

Rencana strategis BPMP Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat menjadi acuan dan arah pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian kebijakan Direktorat Jenderal Paud, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode tahun 2020 - 2024.

Lampiran 1: Definisi Operasional Indikator Kinerja

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Kebernasilan	Sumber Data
SK	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
IKK 2.2.7.11	Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	Persentase dari satuan paud dan dikmas di wilayah masing masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar	(Σ satuan PAUD dan Dikmas yang rapor Pendidikan atau survey lingkungan belajar meningkat / Σ satuan PAUD dan Dikmas pada provinsi/Kab/Kota yang bersangkutan) x 100 %	Meningkatnya persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya mendekati 100%	Rapor Pendidikan
IKK 2.2.7.12	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Persentase dari provinsi/kababupaten/kota di wilayah masing masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya	(Σ satuan Dikdas dan Dikmen yang rapor Pendidikannya meningkat /Σ satuan Dikdas dan Dikmen pada provinsi/Kab/Kota yang bersangkutan) x 100 %	Meningkatnya persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) per tahun mendekati 100%	Rapor Pendidikan
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara				
IKK 5.3.6.1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara	Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]	Meningkatnya nilai dan predikat SAKIP	Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / Laporan hasil evaluasi SAKIP
IKK 5.3.6.1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara	Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	$\boldsymbol{Nilai\ Kinerja\ Anggaran}$ = [$\mathbf{60\%} \times \boldsymbol{Nilai\ EKA}$] + [$\mathbf{40\%} \times \boldsymbol{Nilai\ IKPA}$] Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA. Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)	Meningkatnya Nilai Kinerja Anggaran	Aplikasi SPASIKITA (Terintegrasi dengan Smart DJA)